

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dunia, menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam, terutama minyak bumi semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Kelangkaan minyak tanah masih terjadi, meskipun Indonesia adalah penghasil minyak bumi, namun masalah kebutuhan rumah tangga yang sangat vital ini ternyata belum bisa dipecahkan.

Harga minyak dunia yang terus meningkat, sehingga subsidi untuk minyak tanah pun meningkat. Untuk menghemat APBN, minyak tanah pun dikonversi dengan gas (LPG), dimana kebijakan tersebut melahirkan kebijakan lain, yaitu membagikan paket tabung LPG beserta isi perdananya, kompor gas dan aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah secara gratis untuk mempercepat konversi minyak tanah menjadi gas. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh:

1. Harga minyak dunia meningkat, sehingga subsidi minyak tanah meningkat.
2. Menghemat APBN.
3. Gas alam di Indonesia melimpah.
4. Gas alam yang dinilai lebih ramah lingkungan daripada minyak tanah.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas

propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana (C_5H_{12}) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm². Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada LPG untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat.

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar dalam negeri. Program ini secara khusus juga dimaksudkan untuk mengurangi subsidi BBM guna meringankan beban keuangan negara. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana sekurang-kurangnya Rp 50 triliun untuk mensubsidi penggunaan BBM oleh masyarakat, yang dimaksud adalah minyak tanah, premium dan solar. Di antara 3 jenis BBM tersebut, minyak tanah mendapat subsidi terbesar yaitu dengan alokasi mendekati 50 persen dari total subsidi BBM, sehingga pemerintah mencanangkan program tersebut guna meningkatkan penghematan subsidi BBM melalui pengurangan penggunaan minyak tanah.

Dalam tinjauan lingkungan, program konversi ini bila berhasil dinilai lebih ramah lingkungan. Penggunaan LPG sebagai bahan bakar relatif lebih bersih dan berpolusi lebih ringan dibandingkan dengan bahan bakar minyak tanah. Di samping itu, cadangan gas di perut bumi Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan minyak bumi. Dengan demikian, ada penghematan pemakaian minyak bumi demi keberlanjutan sumberdaya energi di masa yang akan datang.

Namun, program yang bertujuan baik ini terancam gagal dengan banyaknya penolakan oleh masyarakat. Masyarakat yang sudah merasa nyaman menggunakan minyak tanah merasa

terusik kenyamanannya. Kompor gas dengan bahan bakar LPG kurang akrab bagi sebagian besar masyarakat perdesaan, khususnya masyarakat miskin. Belum lagi adanya ketakutan yang berlebihan bahwa kompor gas mudah meledak dan terbakar. Kekhawatiran juga banyak dirasakan oleh para agen dan pengecer minyak tanah dan tentu saja para pembuat kompor minyak tanah. Upaya mendorong masyarakat, khususnya lapisan menengah bawah untuk memakai LPG dapat juga dilihat sebagai upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Masyarakat yang bisa menikmati jenis energi yang bersih ini tentu tidak hanya mereka dari kelompok menengah atas, tetapi juga kelompok menengah ke bawah.

Implementasi dari program tersebut ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat. Daerah-daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba-tiba minyak tanah menghilang. Jikapun ada, harganya mahal, sekitar Rp6.000-an, karena tak ada lagi subsidi. Padahal minyak tanah masih sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kilogram LPG sudah diberikan gratis oleh pemerintah.

Setelah Bandar Lampung dan Lampung Selatan, program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg beralih ke Kabupaten Pesawaran. Pencacahan calon penerima dilakukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten di Provinsi Lampung. Yang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan

Tegineneng. Gedong Tataan adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan (Ibukota Kabupaten Pesawaran).

Penulis memilih studi kasus di Kecamatan Gedong Tataan karena Kecamatan Gedong Tataan merupakan wilayah penghubung antara Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung, yaitu Kecamatan yang paling dekat dengan Ibukota Propinsi yang seharusnya perekonomiannya lebih baik dibandingkan Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten baru, seiring diberlakukannya otonomi daerah maka konsekuensi logis yang muncul adalah tuntutan peningkatan perekonomian daerah. Gedong Tataan juga memiliki pasar yang paling banyak dibanding daerah lain di Pesawaran, dengan adanya pasar pada umumnya usaha mikro juga makin banyak. Usaha mikro dapat memperluas tenaga kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga Gedong Tataan memiliki luas wilayah paling kecil dibanding kecamatan lain namun memiliki jumlah penduduk yang paling padat.

Adapun Jumlah penerima Program dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penerima Program Konversi LPG di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

No	Desa	Rumah Tangga	Usaha Mikro	Jumlah
----	------	--------------	-------------	--------

1.	Bernung	1.051	11	1.062
2.	Negeri Sakti	1.041	3	1.044
3.	Kurungan Nyawa	1.276	25	1.301
4.	Suka Banjar	640	1	641
5.	Kebagusan	1.630	12	1.642
6.	Wiyono	1.616	14	1.630
7.	Taman Sari	1.247	-	1.247
8.	Sungai Langka	1.389	-	1.389
9.	Bogorejo	972	1	973
10.	Sukaraja	1.913	18	1.931
11.	Gedong Tataan	1.203	50	1.253
12.	Bagelen	1.837	13	1.850
13.	Way Layap	671	1	672
14.	Sukadadi	916	2	918
15.	Kutoarjo	752	5	757
16.	Karang Anyar	791	-	791
17.	Padang Ratu	384	4	388
18.	Cipadang	1.968	11	1.979
19.	Pampangan	454	-	454
Total Penerima		21.751	171	21.922

Sumber : Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2009

Tabel 1 memperlihatkan jumlah penerima Program Konversi LPG di Kecamatan Gedong Tataan tersebar di 19 desa. Setiap desa mempunyai jumlah penerima program dengan kategori rumah tangga yang berbeda-beda. Desa Gedong Tataan, untuk usaha mikro sebagai daerah penerima program konversi LPG yang tertinggi. Namun ada juga desa yang usaha mikronya tidak menerima program tersebut. Jumlah total penerima Program Konversi LPG di wilayah Kecamatan Gedong Tataan untuk usaha mikro adalah sebesar 171, sedangkan untuk rumah tangga sebanyak 21.751.

Yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG

- Kementerian Negara Koperasi dan UKM (selanjutnya disebut : KUKM): mengadakan kompor dan aksesorisnya (regulator dan selang) serta mendistribusikannya bersama tabung dari Pertamina.
- PT. Pertamina (Persero) :
 - Menyediakan tabung LPG 3 kg untuk perdana ditambah kebutuhan tabung

untuk rolling.

- Menyediakan gas LPG 3 kg sebagai pengganti minyak tanah
- Mempersiapkan infrastruktur dan jalur distribusinya
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan: melakukan sosialisasi program peralihan penggunaan minyak tanah ke LPG.

Yang menjadi sasaran program konversi minyak tanah ke LPG adalah

a. Rumah Tangga

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- Ibu rumah tangga
- Pengguna minyak tanah murni
- Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat

b. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket LPG 3 kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya
- Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat
- Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Tabel 2. Perbandingan penggunaan kompor gas 3kg dengan kompor minyak tanah

Produk	Harga Satuan	Volume Pemakaian untuk 2 hari	Biaya Pemakaian untuk 2 hari
Minyak Tanah	Rp. 6000,- /liter	6 liter	Rp. 36.000,-
LPG 3kg	Rp. 4.250,- /kg	3kg	Rp. 12.750,-
Penghematan			Rp. 23.250,-

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya (UU No.9 tahun 1995).

Tujuan pembangunan ekonomi yang utama adalah:

1. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan
2. Peningkatan distribusi
3. Peningkatan kesempatan kerja
4. Kestabilan ekonomi
5. Demokrasi ekonomi

Menurut Suparmoko (1994 : 47) pengeluaran pemerintah secara umum dibedakan menjadi :

1. Pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang
2. Pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahteraan masyarakat
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Penerima Program Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: “Bagaimana pengaruh Program Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap peningkatan pendapatan pada usaha mikro di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi serta merata pada kalangan masyarakat keseluruhan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mendorong perubahan masyarakat kepada keadaan yang lebih baik. Usaha pembangunan ekonomi terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola negara dapat

ikut campur secara aktif maupun secara pasif, hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan secara adil. Penciptaan barang dan jasa ini diharapkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai pelosok-pelosok tanah air.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka diharapkan tujuan pembangunan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah karena keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Salah satu peran pemerintah yang sangat penting adalah peran distribusi. Peran distribusi merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar (Dumairy, 1997;158). Dalam hal ini, peran distribusi ini terwujud melalui peran pemerintah dalam program konversi minyak tanah ke LPG.

Harga minyak dunia yang terus meningkat, sehingga subsidi untuk minyak tanah pun meningkat. Untuk menghemat APBN, minyak tanah pun dikonversi dengan gas (LPG). Program konversi minyak tanah ke LPG ini secara resmi diluncurkan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla pada saat itu didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 8 Mei 2007.

Konversi itu sendiri adalah (1) perubahan di satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain; (2) perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya; (3) perubahan suatu bentuk ke bentuk yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa konversi

minyak tanah ke gas elpiji berarti pengalihan pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas LPG.

Penanganan masalah pendanaan untuk program konversi LPG diantaranya adalah:

- Untuk mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG digunakan dana dari pembelanjaan pemerintah (APBN) dan dari swasta yang didukung oleh Perbankan dan Lembaga Finansial lainnya dalam jumlah yang tidak sedikit.
- Pembelanjaan pemerintah dilakukan pada tahap pengalihan minyak tanah ke LPG berupa pengadaan kompor, tabung dan isi perdananya beserta aksesorisnya.
- Pembelanjaan swasta dengan didukung lembaga keuangan dan Perbankan pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG pada tahap *business as usual*.
- Komitmen pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG merupakan garansi bagi swasta untuk berinvestasi penuh pada program ini.
- Selain itu untuk menumbuhkan investasi swasta dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan:
 - insentif fiskal maupun non fiskal bagi Badan Usaha/Pertamina yang ikut dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor dan aksesoris LPG
 - Skema-skema pembiayaan lainnya.

Sejak peluncuran program konversi, ternyata pemerintah masih menggunakan cara-cara lama, yaitu pendekatan top-down. Ini adalah paradigma lama pembangunan di Indonesia, yaitu pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak pernah ditanya, apakah mereka membutuhkan kompor gas dan LPG. Masyarakat diposisikan sebagai objek pembangunan yang harus selalu menerima

apapun yang datang dari atas.

Mengingat masih awamnya penggunaan LPG bagi masyarakat di Indonesia maka program ini memerlukan beberapa tahapan mulai dari pengenalan, sosialisasi, sampling area sampai pada perluasan program konversi. Banyak terjadi penolakan dari masyarakat mengenai program konversi LPG antara lain di sebabkan oleh:

1. Masyarakat yang sudah merasa nyaman menggunakan minyak tanah merasa terusik kenyamanannya.
2. Kompor gas dengan bahan bakar LPG kurang akrab bagi sebagian besar masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat miskin.
3. Adanya ketakutan yang berlebihan bahwa kompor gas mudah meledak dan terbakar.
4. Kekhawatiran juga banyak dirasakan oleh para agen dan pengecer minyak tanah dan tentu saja para pembuat kompor minyak tanah. Terbayang di hadapan mereka kalau akan kehilangan pekerjaan bila program konversi jadi dilaksanakan.
5. Banyak warga tetap enggan menggunakan kompor gas karena khawatir penghasilannya tak selalu cukup untuk membeli isi ulang LPG.
6. Kemungkinan masyarakat akan kembali pada kebiasaan lama, yaitu kebiasaan menggunakan kayu bakar dan minyak tanah yang mampu merugikan bagi diri sendiri.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesisnya adalah di duga dengan adanya program konversi

minyak tanah ke LPG ini berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.